



SINERGITAS KOMANDO RESOR MILITER 043/ GARUDA HITAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Muhammad Sarip Kodar*, Hayatul Khairul Rahmat, I Dewa Ketut Kerta Widana
Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini mencoba menguraikan tentang sinergitas antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana alam, baik pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Adapun metode dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, studi literatur, serta dilakukan pula focus group discussion (FGD). Temuan dari penelitian bahwa dapat dipahami bahwa sinergitas yang digelar Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung berjalan cukup efektif, walaupun masih terdapat hambatan dalam penanggulangan bencana alam, berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, kualitas personel, ego sektoral antar instansi, belum adanya MoU antara kedua pihak, dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh kedua instansi tersebut adalah perkuatan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi pada anggaran, sarana, personel yang diwujudkan dalam MoU.

Kata Kunci: Sinergitas, TNI, Pemerintah Daerah, Bencana Alam.

*Correspondence Address : sarip.kodar@idu.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v7i2.2020.437-447

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki kerentanan terhadap bencana, baik berupa bencana alam dan bencana non alam. Secara geografis, Indonesia berada pada kawasan rawan bencana alam yang berpotensi dapat menjadi ancaman bagi keselamatan umum, seperti gempa bumi, meletusnya gunung api, tsunami, bencana banjir, bencana tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan bencana lainnya, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi (Harsono, 2009; Rahmat *et al*, 2020).

Provinsi Lampung merupakan daerah patahan yang rawan bencana sehingga Lampung bagian selatan terus ke arah barat merupakan daerah pantai yang rawan terhadap gempa dan tsunami khususnya wilayah Kabupaten Kalianda, Kabupaten Tanggamus sampai dengan Kabupaten Pesisir Barat yang rawan terjadinya gelombang pasang tsunami, sedangkan daerah ketinggian sebagian gundul akibat dari masyarakat yang bekerja sebagai petani ladang yang berpindah-pindah sehingga rawan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor (Jokowinarso, 2011). Lampung menjadi salah satu daerah dengan risiko tinggi dan menempati posisi ke-16 dari 33 provinsi sebagai wilayah rawan

bencana di Indonesia berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB, 2018).

Bencana alam yang terjadi tentunya akan mengakibatkan kerugian nyawa harta benda dan dampak psikologi (Rahmat & Alawiyah, 2020). Program-program pembangunan terancam oleh serangkaian bencana yang setiap saat dapat menimpa wilayah-wilayah Indonesia. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak korban jiwa meninggal dunia setiap tahunnya akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia yang terjadi secara sporadis dan kadangkala sulit diprediksi sebelumnya (Naryanto, 2008). Kerusakan infrastruktur fisik, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas vital lainnya akibat bencana berakibat pada aktivitas warga masyarakat karena jembatan hancur, jalan rusak, maupun fasilitas pemerintahan dan perkantoran lainnya yang lumpuh (Rahmat *et al*, 2018).

Sebagai salah satu komponen bangsa, TNI terpanggil di dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Tugas perbantuan ini dilandasi jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang berarti TNI berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Tugas

perbantuan penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan oleh TNI merupakan salah satu bagian dari OMSP yang menjadi tugas pokok TNI. TNI AD khususnya telah membuat Pedoman Penanggulangan Bencana Alam di Darat yang disahkan dengan Peraturan Kasad nomor Perkasad/96/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009. Upaya penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, harus dilakukan oleh berbagai pihak, melibatkan pemerintah, masyarakat, kekuatan masyarakat sipil, maupun komunitas bisnis. Sinergi dalam penanggulangan bencana alam harus terus ditingkatkan agar supaya mampu mengurangi resiko bencana, mendeteksi kapan terjadinya bencana, maupun melakukan upaya-upaya mitigasi bencana sedini mungkin. Tanpa adanya sinergi antar berbagai pihak terkait, maka penanggulangan bencana alam akan mengalami hambatan (Priambodo *et al.*, 2020).

Salah satu sinergi yang harus dioptimalkan secara terus menerus adalah sinergi antara TNI AD di Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan upaya penanggulangan bencana alam baik di pusat maupun di daerah. TNI AD

sebagai kekuatan pertahanan darat di Indonesia mengemban misi tidak hanya menangkal, menindak dan menghancurkan musuh semata, melainkan juga mengemban misi sipil (*civic mission*), berupa membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Indonesia.

Dalam perspektif kebencanaan, wilayah Provinsi Lampung memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Di wilayah ini terdapat daerah rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, pohon tumbang, puting beliung, dan kebakaran (Musiana, 2015). Bayangkan saja apabila terjadi bencana alam di wilayah ini dalam eskalasi yang besar, maka akan memengaruhi ekonomi di wilayah tersebut. Provinsi Lampung adalah jalur penghubung antara pulau Jawa dan Sumatera sehingga ketika terjadi bencana alam, maka akan memengaruhi pergerakan logistik dari pulau Jawa ataupun sebaliknya, yang akan memengaruhi perekonomian di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam menanggulangi bencana alam sehingga akan mampu mendukung program

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif bergantung pada teks dan data visual, metode ini memiliki analisis yang unik pada tahap analisis data, dan bertaruh pada desain yang beraneka ragam (Cresswell, 2014; Rahmat *et al.*, 2020). Adapun teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, studi literatur, serta dilakukan pula *focus group discussion* (FGD). Data sekunder berupa dokumen elektronik dan dokumen fisik yang dikumpulkan. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan merangkum dan memilih hal-hal yang dianggap penting serta dicari tema dan polanya.

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen, foto, maupun gambar untuk ditarik kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif analitik yaitu dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya (Marufah *et al.*, 2020), kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Sudarto, 1997). Teknik pengujian keabsahan data melalui *member check*, teman sejawat, perpanjangan pengamatan, dan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerawanan Bencana Alam di Provinsi Lampung

Wilayah Provinsi Lampung berada di wilayah yang rawan bencana alam. Wilayah Provinsi Lampung sangat kompleks dan kaya akan sumber daya alam karena memiliki wilayah yang sangat lengkap. Di wilayah ini terdapat pesisir pantai, pegunungan, perbukitan, sungai, dan dataran tinggi yang ada di wilayah bagian utara (Naryanto, 2003). Daerah rawan longsor di sisi barat Lampung melingkupi Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan beberapa daerah di Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah,

serta Pesawaran, di wilayah bagian utara sangat rawan terjadinya bencana alam berupa tanah longsor dan banjir. Sedangkan di wilayah selatan terdapat potensi gempa bumi, tsunami, dan kebakaran. Bencana alam ini sangat mengancam keselamatan manusia, membahayakan aktivitas manusia dan dapat merusak semua fasilitas fisik, fasilitas sosial, dan infrastruktur yang telah dibangun dan menunjang kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung.

Secara geografis, Lampung merupakan provinsi paling selatan di pulau Sumatera dengan luas 35.288,35 km² (BPS, 2019), termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Berdasarkan hasil analisis indeks risiko bencana banjir di Lampung dengan mempertimbangan berbagai aspek ancaman, aspek kerentanan, dan aspek kapasitas terdapat 136 titik lokasi/ kecamatan yang kerap dilanda banjir setiap tahunnya di 14 kabupaten/ kota. Berdasarkan analisis sebaran ancaman longsor diketahui 5.690,2 km² (16,1%) merupakan area dengan ancaman longsor tinggi, ancaman longsor sedang seluas 11.041,8 km² (31,3%), dan sisanya ancaman longsor rendah. Secara

kumulatif jumlah area yang berpotensi terjadi longsor tinggi hingga sedang yang mencapai 47,4% tergolong luas dan patut menjadi perhatian bersama.

Berikut ini akan diuraikan gambar berupa peta daerah rawan bencana yang ada di wilayah Provinsi Lampung:



Gambar 2: Peta Daerah Rawan Bencana Provinsi Lampung
Sumber: BPBD Lampung (2019)

Sinergitas Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung

Sinergitas antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana alam sangat diperlukan, ditingkatkan, dan dipelihara, baik sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam memiliki sumber daya manusia berupa personel yang mumpuni, terlatih, terdidik, dan kompeten dalam urusan penanganan bencana alam, namun tidak memiliki anggaran dan sarana prasarana yang besar untuk mendukung

penanggulangan bencana alam (Priambodo *et al.*, 2020). Sedangkan, Pemerintah Provinsi Lampung kurang memiliki sumber daya manusia yang terlatih di dalam organisasi BPBD-nya, namun memiliki anggaran yang besar dalam alokasi APBD setiap tahunnya dan memiliki sarana prasarana/ peralatan/ alat berat yang lengkap dan modern dalam mendukung penanggulangan bencana alam.

Hal ini tentunya menjadi potensi terwujudnya sinergi berupa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan bencana alam di berbagai wilayah di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan sinergitas yang telah terjalin antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana alam:

Pertama, pada tahap pra bencana, telah terjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang cukup efektif antara jajaran Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana alam. Komunikasi dilakukan oleh Komandan

Korem 043/ Garuda Hitam terhadap Gubernur, Ketua DPRD dan Ketua Pelaksana BPBD Provinsi Lampung untuk membahas tentang upaya menyadarkan masyarakat akan terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah Provinsi Lampung, melalui sosialisasi, pembimbingan, dan penyuluhan ke berbagai kecamatan dan desa sehingga diharapkan masyarakat akan sadar akan bahaya bencana alam.

Kegiatan kolaborasi yang dilakukan antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan BPBD Provinsi Lampung dalam mitigasi bencana dan berbagai upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya bencana alam adalah memberikan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, memperbaiki selokan, melarang mendirikan bangunan di bantaran sungai, menanam pohon di wilayah perbukitan yang gundul, serta memperketat perijinan pendirian bangunan di daerah hutan lindung maupun daerah hijau lainnya.

Selain itu, dilakukan pula setiap tahunnya pelatihan antara personel TNI dan jajaran BPBD yang melibatkan Taruna Tanggap Bencana, PMI, maupun LSM Kebencanaan tentang sistem peringatan dini tsunami yang dilakukan

di wilayah pesisir pantai Lampung Selatan, maupun berbagai pantai di wilayah lainnya (Rahmat, 2019). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang bisa saja terjadi di wilayah pesisir pantai selatan Provinsi Lampung.

Kedua, pada tahap tanggap bencana alam terjadi, telah terjalin sinergi yang efektif antara jajaran Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan aparat pemerintah daerah Provinsi Lampung, khususnya BPBD Provinsi Lampung. Bencana alam yang besar dan berskala nasional belum pernah terjadi di wilayah Provinsi Lampung, namun bencana dengan skala lokal sering terjadi, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin puting beliung, kebakaran lahan, dan gempa bumi dengan skala yang di bawah 6.5 SR.

Komunikasi dan koordinasi selalu dijalin antara Komandan Korem 043/ Garuda Hitam dengan jajaran pemerintah daerah dan BPBD Provinsi Lampung ketika bencana alam terjadi, khususnya pada tanggap darurat, yang diprioritaskan untuk evakuasi korban dan penyelamatan nyawa manusia yang terkena dampak banjir, tanah longsor, maupun kebakaran lahan. Rapat koordinasi selalu dilakukan pada masa tanggap darurat untuk mengidentifikasi

korban bencana, jumlah kerugian materiil maupun pemenuhan kebutuhan pengungsi.

Selain itu, kolaborasi selalu ditunjukkan oleh aparat di level bawah, seperti Babinsa dengan kepala desa setiap terjadi bencana alam. Babinsa dan *stakeholder* dalam melakukan evakuasi korban juga dibantu oleh POLRI, Taruna Tanggap Bencana, ORARI, LSM Kebencanaan, dan Karang Taruna.

Ketiga, pada tahap pasca bencana, sudah terjalin sinergi yang efektif antara jajaran Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan aparat pemerintah daerah Provinsi Lampung, khususnya dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan pemerintah Provinsi Lampung saling bahu membahu dan saling melengkapi untuk membangun berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana alam sehingga dapat segera pulih dan dapat dipergunakan lagi untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Koordinasi juga dilakukan oleh jajaran Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan jajaran BPBD Provinsi Lampung untuk membahas pemenuhan kebutuhan di tempat pengungsian dengan membuat dapur umum, penyelenggaraan pelayanan

kesehatan darurat, pelayanan pendidikan darurat dan konseling psikologi untuk menghilangkan trauma para korban maupun pengungsi.

Selain itu, kolaborasi yang dilakukan antara jajaran personel Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan jajaran pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas sosial, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam.

Hambatan yang Dihadapi

Sinergitas antara jajaran Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan aparat pemerintah Provinsi Lampung, khususnya BPBD Provinsi Lampung dalam menggelar operasi penanggulangan bencana alam yang sebenarnya sudah cukup efektif masih ada hambatan atau kendala. Hambatan yang dihadapi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dan pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana alam antara lain sebagai berikut.

Pertama, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam masih mengalami keterbatasan anggaran dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana alam sehingga memengaruhi kinerja dalam

pelaksanaan tugas operasi penanggulangan bencana alam membantu pemerintah daerah.

Kedua, kualitas BPBD Provinsi Lampung yang masih lemah. Organisasi BPBD merupakan SKPD/ OPD yang berada di bawah struktur organisasi pemerintah Provinsi Lampung dimana personilnya belum semua terdidik, terlatih, dan memiliki kompetensi di bidang kebencanaan, sehingga memengaruhi kinerja BPBD dalam setiap pelaksanaan tugas kebencanaan. Personel yang ditugaskan di BPBD masih dianggap sebagai personel buangan, masuk kotak, dan sulit naik kariernya. Jarang sekali orang yang ditugaskan di BPBD secara ikhlas karena panggilan kemanusiaan sehingga banyak yang menginginkan untuk pindah ke dinas lain yang lebih basah dan prospektif bagi kariernya.

Ketiga, ego sektoral antar instansi. Masih ada ego sektoral, ego kelembagaan, dan ego organisasi dalam penanggulangan bencana alam, dimana tidak jarang ada yang menginginkan tampil di depan yang ingin disorot media sebagai lembaga/ organisasi yang paling berjasa dalam evakuasi korban bencana alam. Setiap instansi masih ada yang menginginkan tampil di depan dan saling berebut dan berkompetisi untuk

disorot media sebagai pihak yang paling berjasa dalam menolong korban bencana agar supaya mendapatkan pujian, prestasi maupun hadiah tertentu.

Keempat, belum ada kerjasama antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana alam. Selama ini di Provinsi Lampung belum ada semacam kerjasama antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan pemerintah Provinsi Lampung yang mengatur tentang siapa berbuat apa, kapan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Payung hukum berupa MoU sangat penting untuk mengatur kewenangan maupun batasan bertindak antara Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana, termasuk proses penggunaan peralatan berat BPBD oleh Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dan proses penyaluran anggaran APBD untuk Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam operasi penanggulangan bencana alam.

Kelima, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran masyarakat terhadap bencana alam sangat penting untuk mendukung operasi penanggulangan bencana alam.

Kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Lampung masih cukup rendah, terbukti dengan perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai/ selokan, mendirikan bangunan di bantaran sungai, menebang pohon di hutan lindung, mendirikan bangunan tanpa IMB di wilayah perbukitan, maupun tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan. Perilaku masyarakat yang tidak peduli lingkungan sekitarnya ini berpotensi timbulnya bencana banjir, tanah longsor dan pohon tumbang, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam operasi penanggulangan bencana alam.

SIMPULAN

Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang sangat strategis karena menjadi jalur penghubung antara pulau Jawa dan Sumatera yang ada di pulau Sumatera dimana terdapat pesisir Pantai dan pegunungan sehingga faktor pergerakan logistik dapat berpengaruh untuk ekonomi wilayah dan berbagai obyek wisata pantai sehingga menjadi destinasi bagi wisatawan domestik bahkan wisatawan asing. Wilayah ini menjadi daya tarik wisatawan sehingga harus terjaga dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana alam.

Ancaman bencana alam yang selama ini terjadi di wilayah Provinsi Lampung dengan skala yang kecil/rendah adalah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, pohon tumbang, kebakaran lahan, tsunami dan gempa bumi. Ancaman bencana alam ini perlu dilakukan langkah pencegahan dan penanganannya secara cepat, tepat, dan sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat sehari hari dan pembangunan daerah.

Upaya penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Lampung bersama dengan jajaran Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam relatif baik, pada tahap sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Kegiatan teknis komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara jajaran Korem 043/Garuda Hitam dengan aparat BPBD Provinsi Lampung selalu dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan untuk mendeteksi potensi terjadinya bencana, upaya mitigasi bencana, melakukan evakuasi korban saat tanggap darurat, dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hambatan yang dihadapi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dan pemerintah Provinsi Lampung dalam penanggulangan

bencana alam adalah masih belum optimalnya anggaran Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam, keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam, kualitas/ kompetensi aparat BPBD yang masih rendah, adanya ego sektoral antar instansi dalam penanggulangan bencana alam, belum adanya MoU antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam penanggulangan bencana alam, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2018). Indeks Risiko Bencana Indonesia. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPBD Lampung. (2019). Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung. Bandar Lampung: BPBD Provinsi Lampung.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: SAGE.
- Harsono, (2009). *Kapita Selekta Neurologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jokowinarno, D. (2011). Mitigasi Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Lampung. *Jurnal Rekayasa*, 15(1), 13-20.
- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia.

- NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191-120.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Sadana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. Jakarta: UI Press.
- Musiana. (2015). Studi Kualitatif Ancaman, Kerentanan, dan Kemampuan Mitigasi Bencana Masyarakat di Pesisir Bandar Lampung. *Jurnal Keperawatan*, 11(2), 262-269.
- Naryanto, H. S. (2003). Mitigasi Kawasan Pantai Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Terhadap Bencana Tsunami. *Alami*, 8(2), 24-32.
- Naryanto, H. S. (2008). Analisis Potensi Kegempaan dan Tsunami di Kawasan Pantai Barat Lampung Kaitannya dengan Mitigasi dan Penataan Kawasan. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 10(2), 71-77.
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.
- Rahmat, H. K. (2019). Mobile Learning Berbasis Appypie sebagai Inovasi Media Pendidikan untuk Digital Natives dalam Perspektif Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 33-50.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91-107.
- Rahmat, H. K., Kasmi, & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur'ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 2, 455-461.
- Rahmat, H. K., Nurmalasari, E., & Basri, A. S. H. (2018). Implementasi Konseling Krisis Terintegrasi Sufi Healing Untuk Menangani Trauma Anak Usia Dini pada Situasi Krisis Pasca Bencana. *Prosiding Seminar Nasional PIT ke- 5 Riset Kebencanaan IABI 2018*, 671-678.
- Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.